



Kebebasan Politik Menurut Hannah Arendt dan Relevansinya Bagi Masyarakat Indonesia

Fransesco Agnes Ranubaya^{1*}, Nikodemus², Yohanes Endi³

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Kota Malang, Indonesia

Submitted : 13 November 2022 Revision : 6 July 2023 Accepted : 25 July 2023

Abstract

The study focuses on freedom and politics, which are often contrasted, as if politics and freedom are contradictory. There is an assumption that there is no freedom in politics or that people are free to do anything with politics. This assumption has developed so that the two can never be united. In the political situation, a political theorist named Hannah Arendt felt an anxiety. The purpose of writing this scientific paper is to explore the idea of political freedom according to Hannah Arendt and find its relationship in Indonesian society. The method used in this writing is the literature method with a literature approach. The research results of this study discuss work that is not related to daily activities (labor) but work (work) for a common goal. Meanwhile, in relation to Indonesian politics, work ethic is an attitude that leads to the best results, high competitiveness, optimism and looking for productive and innovative ways to sustain an independent Indonesia. Regarding freedom, Arendt takes the Athenian polis as a model of communicative and open speech space which is the same as politics

Keywords : *Hannah Arendt, freedom, politics, government action*

Abstrak

Fokus studi pada kebebasan dan politik yang kerap kali dipertentangkan, seolah-olah politik dan kebebasan itu bertentangan. Ada anggapan bahwa di dalam politik tidak ada kebebasan atau dengan politik orang bebas berbuat apa saja. Anggapan semacam ini itu berkembang sehingga membuat keduanya itu tidak pernah dapat bersatu. Dalam situasi politik seorang teoritikus politik bernama Hannah Arendt merasakan suatu kegelisahan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mendalami gagasan kebebasan politik menurut Hannah Arendt dan menemukan hubungannya dalam masyarakat Indonesia. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian dari penelitian ini membahas mengenai kerja yang tidak berkaitan dengan aktivitas sehari-hari (labor) melainkan karya (work) untuk tujuan bersama. Sementara itu kaitannya dengan politik Indonesia, etos kerja merupakan sikap yang bermuara pada hasil yang terbaik, berdaya saing tinggi, optimisme dan mencari cara-cara produktif dan inovatif dalam menopang Indonesia yang mandiri. Terkait kebebasan, Arendt mengambil polis Athena sebagai sebuah model ruang pidato yang komunikatif dan terbuka yang sama artinya dengan politik.

Kata Kunci: Hannah Arendt, kebebasan, politik, tindakan pemerintah.

How to cite : **Ranubaya, F. A. et al** (2023). Kebebasan Politik menurut Hannah Arendt dan Relevansinya bagi Masyarakat Indonesia. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 15 (2): 121 – 147.

*Corresponding author: Fransesco Agnes

E-mail: fransescoagnesranubaya@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada umumnya individu tidak bisa secara keras menyentuh satu isu politik tanpa, secara implisit atau eksplisit, menyentuh isu tentang kebebasan manusia (Hannah Arendt, 1961). Dalam kebebasan memilih calon pemimpin yang akan dipilih. Identifikasi yang umum dipakai untuk menilai kelayakan seorang pemimpin yang akan dipilih. Identifikasi yang umum dipakai untuk menilai kelayakan para calon pemimpin adalah visi misi, kepribadian baik (adil, bijaksana dan jujur) dan lain sebagainya. Semua identifikasi itu adalah kriteria agar kebebasan warga tidak terabaikan. Hal ini dapat dipahami karena pluralitas adalah seluruh kondisi hidup politik yang spesifik. (Hannah Arendt, 1958) Sehingga praktis berbicara soal politik berarti berbicara soal kebebasan manusia juga. Dalam sejarah hidup manusia tidak terlepas dari persoalan antara politik dan kebebasan. Politik yang didominasi oleh penguasa membuat warga negara kehilangan kebebasannya. Contohnya ketika Orde Baru berkuasa, Presiden Soeharto menggunakan kekuasaannya secara

otoriter dalam mengeluarkan kebijakan seperti represi (konsolidasi politik dengan kekerasan), kientelisme ekonomi (penguasaan material yang terkonsentrasi), wacana partikularistik (kontrol persepsi dan pola pikir masyarakat), subordinasi bisnis terhadap negara (sektor bisnis bergantung pada negara), dan pengendalian birokrasi sipil dan militer (Farchan, 2022). Tidak hanya itu, sikap pemerintahan Orde Baru yang membungkam media di mana pers mau tidak mau menuruti keinginan pemerintah (Eddyono, 2021).

Penguasa yang dimaksud identik dengan pemerintah, dapat dipahami melawan pemerintah berarti mati (fisik atau identitas). Hal ini yang memunculkan *credo* liberal, "Politik berkurang kebebasan bertambah" (Hannah Arendt, 1961). Dalam dunia modern dewasa ini banyak orang beranggapan bahwa hak-hak asasi manusia justru karena ciri pra-politisnya dapat menjadi kriteria keadilan bagi hak-hak warga negara (Hardiman, 2007). Hak berciri pra-politis yang dimaksud adalah hak asasi. Itu sama dengan kebebasan batin, keduanya sama-sama dimiliki

oleh manusia tetapi tidak tampak dalam pengalaman. Jika hak asasi menjadi kriteria keadilan maka sikap yang ditimbulkan adalah *semaunya dewe*. Padahal manusia adalah bagian dari badan politik, berada dalam negara dan menjadi warga negara Indonesia. Adanya keadaan seperti itu, maka politik memanfaatkan relasinya dengan orang lain untuk memenuhi hak asasi. *Credo* muncul adalah, "Politik bertambah kebebasan bertambah". Menurut refleksi Hannah Arendt, kebebasan dengan politik itu inheren (Hannah Arendt, 1961). Kebebasan adalah tujuan langsung orang yang berpolitik. Namun, kebebasan setiap orang (mempunyai kebebasan batin) tidak otomatis diakui. Hanya melalui tindakan kebebasan batin dapat ditampakkan. Sedangkan tindakan yang muncul dari relasi langsung secara spontan dan berkarakter natalitas. Berdasarkan penjelasan dari Hannah Arendt itu,

Dari persoalan yang muncul seperti "politik bertambah dan kebebasan pun bertambah", berbagai macam pertanyaan muncul di pikiran penulis, apakah politik dan kebebasan itu saling bertentangan? Ataukah politik memang inheren dengan kebebasan? Lantas bagaimana relasi keduanya? Pertanyaan seperti ini dapat dirangkum dalam satu pertanyaan fundamental yaitu, apa arti kebebasan politik? Hannah Arendt, seorang teoritikus politik (H. Arendt, 1994), telah berpendapat sekuat tenaga dengan pertanyaan-pertanyaan politik. Aksi yang dilakukan Arendt telah memberikan refleksi yang mendalam. "untuk menjadi bebas dan bertindak adalah sama" (Hannah Arendt, 1961). Meskipun kebebasan batin sudah ditampakkan oleh tindakan, namun tindakan itu membutuhkan ruang lingkup yang dapat menjamkannya. Dalam konteks ini, politik adalah dunia yang memungkinkan tindakan seseorang diakui. Oleh sebab itu, jika orang ingin bebas, maka ia tidak boleh mengabaikan orang dan negaranya, karena kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari orang lain.

Dari pemahaman di atas menurut penulis gagasan Arendt tentang kebebasan politik sangat menarik untuk didalami. Berdasarkan

permasalahan di atas, penulis merasa pemikiran Arendt ini sangat layak untuk dikupas lebih dalam karena sejalan dengan identitas bangsa Indonesia melalui politik demokrasi, agar pemahaman mengenai kebebasan dalam politik bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Dalam politik Indonesia, kebebasan yang diatur dalam demokrasi merupakan budaya dan kepribadian bangsa yang memperhatikan hal-hal berikut: (1) menjunjung tinggi perbedaan, (2) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, (3) membudayakan sikap yang adil, (4) membiasakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, (5) mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional (Rd, 2021).

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mendalami gagasan kebebasan politik menurut Hannah Arendt dan menemukan hubungannya dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran politik. Tujuan lain dari pemikiran Hannah Arendt ini adalah untuk mengenal sekaligus mengenal Hannah Arendt dan pemikirannya secara lebih mendalam belajar politik dari Hannah

Arendt dan menemukan pemikiran baru yang berguna untuk kehidupan penulis dan pembaca.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan. Penulis menggunakan beberapa buku karya Hannah Arendt sebagai buku utama yaitu *Essays in Understanding* (1994), *The Human Condition* (1958), dan *Asal-Usul Totalitarianisme* (1995). Lalu ada beberapa buku yang lain sebagai buku penunjang seperti "Filsafat Politik Hannah Arendt, Hannah Arendt dan Politik yang Bermartabat dan Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt", jurnal ilmiah seperti "Eskalasi Tindakan Politik dalam Perspektif Filosofis Hannah Arendt, Pendidikan Multikultural bagi Generasi Emas dalam Kerangka Diagnosis Arendt, Hannah Arendt: Kekerasakan Bukan Tindakan Politik, Namun Bukan Tanpa Resiko, Menyimak Tabir Politik Otentik Arendtian: Sebuah Pembacaan dari Perspektif Etika Politik" yang digunakan untuk menjelaskan gagasan Hannah Arendt, namun itu semua

hanya menjadi penunjang bagi buku utama yang digunakan untuk memahami pemikiran Hannah Arendt. Dalam proses penulisan,, penulis mengutip dari buku-buku dan gagasan-gagasan inti dari apa yang dibahas mengenai kebebasan dalam politik. Dari gagasan yang dikutip itu diuraikan dan menemukan pemikiran baru mengenai pikiran Hannah Arendt terutama dalam politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Hannah Arendt

Memahami gagasan politik Hannah Arendt, perlu diketahui sisi biografisnya. Catatan biografis dan karya-karya Hannah Arendt dirangkum penulis berdasarkan deskripsi biodata Arendt. Hannah Arendt lahir di Hannover, Jerman, 14 Oktober 1906. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Paul dan Martha (Cohn) Arendt. Masa kecil Arendt banyak diwarnai oleh duka cita, teror, dan ketidakbahagiaan. Eksistensinya dan keluarganya sebagai orang Yahudi membuat hidupnya diliputi kegelisahan dan ketakutan. Arendt dan keluarganya selalu menjadi sasaran dan target genosida Nazi.

Dampak dari kegelisahannya adalah ketidakbebasan untuk mengapresiasi secara total sifat-sifat masa kecilnya. Saat masih berusia 7 tahun, Arendt harus mengalami pengalaman tapal batas yaitu ayahnya meninggal dunia karena sakit(Jemali, 2015).

Karena situasi yang didominasi oleh teror dan intimidasi, Arendt dan ibunya beberapa kali berpindah tempat tinggal. Dari Hannover, mereka ke kDnigsberg dan kemudian ke Berlin. Di saat usianya menginjak 13 tahun, ibu dari Hannah Arendt menikah lagi dengan Martin Beerwald yang memiliki dua putri yaitu Eva dan Clara Beerwald. Keputusan yang diambil ibunya ini membuat Arendt bertambah gelisah dan bingung. Dia gelisah dan bingung karena ibunya harus memberikan perhatian kepada ayah barunya yang sebelumnya tidak ia kenal dan juga karena kedekatan Eva dan Clara dengan ibunya. Dia berpikir bahwa ibunya tidak akan memperhatikan kehidupannya seperti sebelumnya. Menjadi seorang Yahudi membuat Arendt diliputi suasana gamang. Gamang bukan saja karena

ancaman teror dan intimidasi fisik dari Nazi tetapi juga karena tidak adanya ruang untuk mengapresiasi gagasan filosofisnya secara bebas (Jemali, 2015).

Apalagi pemerintah Hitler dan Nazi waktu itu mengontrol secara absolut publikasi pers dan berusaha mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor kepentingan mereka. Tulisan-tulisan para filsuf bisa dipublikasikan sejauh itu menguntungkan mereka. Arendt merasa kehabisan energi karena dipaksa untuk menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam dirinya (Etinger, 2003:234). Setelah menamatkan pendidikan dari sekolah tinggi KDNigsberg tahun 1924, Arendt memulai studi teologi di bawah asuhan Rudolf Bultmann di Universitas Marburg. Ia menekuni filsafat, teologi, bahasa Yunani dan Latin. Di universitas yang sama, dia bertemu dengan Martin Heidegger, seorang filsuf eksistensialis. Awalnya Heidegger adalah teman diskusi filsafatnya tetapi kemudian menjadi kekasihnya. Dalam sepucuk surat yang tidak pernah terkirim ke Heidegger, Arendt

menulis, "Heidegger adalah orang kepada siapa saya akan selalu berlaku setia dan tidak setia, dan dalam kedua situasi tersebut saya akan tetap mencintainya." Salah satu karya besar Heidegger *Sein und Zeit (Being and Time)* turut menginspirasi dan memotivasi minat Arendt terhadap filsafat eksistensialisme. Hubungan ini terputus ketika Arendt melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg (Jemali, 2015).

Di Heidelberg, dia mendapat bimbingan spesifik dari Karl Jaspers. Berkat tuntunan Jaspers, Arendt dapat menyelesaikan disertasinya tentang konsep cinta dalam pemikiran St. Agustinus. Tahun 1929 Arendt bertemu Gunther Stern, seorang filsuf Yahudi. Karena kapasitas intelektual yang brilian dan kualitas fisiknya yang menarik, Arendt jatuh cinta kepada Stern dan menikah dengannya pada bulan September 1929. Pada tahun yang sama, dia berhasil menyelesaikan disertasinya tentang ide cinta dalam perspektif St. Agustinus dan berhasil meraih gelar doktornya di usia sangat belia, 22 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya, dia melanjutkan

keterlibatannya dalam politik Yahudi dan Zionis yang telah dimulainya sejak 1926. Karena terancam oleh teror Nazi, dia melarikan diri ke Paris pada tahun 1933, tempat dia bertemu dan berteman akrab dengan Walter Benjamin dan Raymon Aron. Tahun 1936, dia bertemu Heinrich Blücher, seorang pelarian politik Jerman. Menceraikan Stern dan tahun 1940 menikahi Blücher. Tahun 1941, Arendt dan Blücher melarikan diri ke Amerika Serikat setelah pecah perang dunia II dan penangkapan serta pengebosan besar-besaran orang-orang Yahudi ke dalam kamp. Tahun 1970 Blücher meninggal dunia sedangkan Hannah Arendt sendiri meninggal pada tanggal 4 Desember 1975 (Jemali, 2015).

Karya-karya Hannah Arendt

Tulisan-tulisan kritis-filosofis yang dihasilkan Hannah Arendt tidak terlepas dari konteks masyarakatnya. Konteks dan refleksi kritis selalu korelasional. Bahkan refleksi kritis dapat membuka horison baru dalam realitas konteks. Konteks menginspirasi untuk melakukan sesuatu yang konstruktif. Konstruksi filsafat politiknya mengindikasikan

protesnya terhadap berbagai kebijakan dalam pemerintahan bangsa Jerman (Hitler dan rezim Nazi) yang tidak menghargai minoritas, tidak responsif terhadap keadilan serta maraknya kontinuitas pembantaian terhadap sesama manusia. Tindakan ini serentak meminimalisasi eksistensi humanitas. Suasana damai tidak mendapat ruang yang cukup untuk dinikmati. Hannah Arendt juga secara radikal melakukan protes terhadap legalisasi tindakan kekerasan. Kekerasan yang nyata dalam peristiwa genosida/ *holocaust* meninggalkan goresan luka historis yang sulit untuk dilupakan. Arendt menuangkan gagasan-gagasan kritisnya lewat berbagai tulisan-tulisannya. Dia yakin bahwa kekuatan kata-kata mampu mempengaruhi opini publik serta mengarahkan publik untuk keluar dari keterbelengguan dan ketertindasan. Tahun 1946 Arendt menerbitkan *What is Existenz Philosophy?* Tahun 1951 *The Origins of Totalitarianism* yang mulai ditulis semenjak 1944, diterbitkan (Jemali, 2015).

Buku ini bercerita tentang *in Jerusalem: A Report on the Banality of Nazisme* yang ditelusuri dari sisi historis dan elemen-elemen subyektif. Elemen-elemen tersebut adalah soal kekuasaan, konsep identitas dan komunitas, karakter moral dan emosional fenomena manusia. Arendt tidak pernah mempercayai teori bahwa Nazisme terjadi karena ulah individu Hitler yang mempunyai kelainan jiwa. Ia selalu mengembalikan penjelasannya kepada persoalan politik imperialis, pemikiran rasis, dan adanya alienasi dunia. Arendt menerbitkan *The Human Condition* dan *Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess* pada tahun 1958. Tahun 1959 dia menerbitkan *Reflections of Little Rock*. Tahun 1961 Arendt menerbitkan *Between Past and Future*, dan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk meliput pengadilan Adolf Eichmann untuk surat kabar *The New Yorker*. Tahun 1963 Arendt menerbitkan refleksi-refleksi kontroversialnya tentang pengadilan Adolf Eichmann (seorang tokoh penting Nazi yang terlibat dalam proyek holocaust) di surat kabar *The New Yorker* dan kemudian dalam bentuk buku yang berjudul *Eichmann* *in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Pada tahun itu juga dia menerbitkan *On Revolution*. Di dalam karyanya ini, dia melihat secara mendalam apa yang disebut dengan *selfhood* (diri) dalam pergerakan liberal untuk memperlihatkan bahwa sentimen-sentimen pribadi mengkorupsi konsep kebebasan. Dalam pembahasannya, Arendt mengkontraskan dua pemikiran revolusi yaitu pemikiran Revolusi Perancis dan Amerika. Ia tertarik pada pemikiran revolusi Amerika yang berangkat dari kemiskinan dan komitmen rakyatnya untuk membuat Amerika menjadi teratur dengan mendasarkan diri pada ketaatan hukum. Ini menurutnya berbeda dengan revolusi Prancis yang berangkat dari keinginan untuk memberontak pada rezim yang ada sehingga mengakibatkan kaos dan penindasan. Pada tahun 1968 Arendt menerbitkan *Men in Dark Times* (Jemali, 2015). Tahun 1970 Arendt menyampaikan seminarnya tentang "filsafat Penilaian Kant" di *New School* (Amerika) yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul

Reflections on Kant's Political Philosophy, yang ketiga dan terakhir, *Judging* 1982. Tahun 1971 dia menerbitkan (*Arendt, 1985; Arendt, 1973; Arendt, Thinking and Moral Considerations* dan 1958; d'Entrèves, 2003; Jemali, *Crises of The Republic* pada tahun 2006:131-132)(Jemali, 2015).

berikutnya. Tahun selanjutnya dia mengerjakan proyek penulisan tiga jilid *The Life of The Mind*. Jilid I dan II yang berjudul *Thinking and Willing* mendapat banyak penghargaan. Pada jilid pertama, Arendt membahas persoalan *Thinking* (berpikir) dengan analisis fenomenologi, aktivitas mental berpikir, ekspresi dan tindakan. Pertanyaan yang menjadi fokusnya adalah "Apa yang disebut dengan berpikir? Dan dimanakah suatu individu berada dalam ruang dan waktu saat sedang berpikir?" dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ia mengulasnya dalam dua bagian. Pada bagian pertama ia mengulas persoalan-persoalan *Being and Appearance* (Ada dan Penampakan). Pada bagian kedua ia mengulas soal kehendak. Kehendak baginya sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk memikirkan masa lalu dan masa depan. Arendt meninggal pada saat ia baru saja mulai menggarap karyanya

Pemikiran filsafat kedua tokoh Aritotels dan Platon telah menjadi inspirasi di pikiran banyak filsuf setelahnya. Pengaruh pikiran mereka tidak bisa hilang oleh waktu. Sebagai pemikir yang mengawali filsafat wajar sekali pemikiran mereka atetap eksis karena merekalah yang meletakkan pondasi berpikir yang baik, sistematis, secara khusus pemikir filsafat. Oleh sebab itu, jika semua pemikiran filsuf setelah mereka dicermati secara seksama pasti ada pengaruh pemikiran kedua tokoh ini pada pemikiran Hannah Arendt. Pemikiran Hannah Arendt juga dipengaruhi oleh Aristoteles dan Platon, Aristoteles memberikan pengaruh yang positif, sedangkan Platon memberikan pengaruh yang negatif. Positif dan negatif di sini bukan merupakan distingsi moral, melainkan tanda untuk menunjukkan reaksi Arendt terhadap pemahaman filsafat. Hannah Arendt menerima pemikiran Aristoteles, tetapi Arendt menolak

pemikiran Platon. Agar memahami kedua pemikiran ini lebih dalam lagi maka penulis membedakan kedua sudut pandang ini sebagai berikut(Hannah Arendt, 1958).

Aristoteles adalah filsafat adalah yang mendasarkan realitas pada apa yang tampak dan dapat diindrai, sedangkan Platon mendasarkan realitas pada dunia ide. Gagasan mereka bertolak belakang dengan Platon. Hal ini membuat pemahamannya tentang realitas menjadi sangat berbeda dengan realitas lainnya. Aristoteles melihat realitas sebagai yang dapat berubah-ubah, sedangkan Platon melihat realitas sebagai yang tidak dapat berubah artinya tetap. Pemahaman seperti ini digagas oleh Aristoteles mengenai realitas, Hannah Arendt juga berpendapat bahwa dasar realitas adalah natalitas. Hannah Arendt melihat bahwa realitas itu selalu baru dan mempunyai penemuan baru. Itu tidak pernah sama dengan yang sebelumnya atau yang akan datang sesudahnya. Dengan pemahaman yang mendalam realitas itu dipandang sebagai yang berubah-ubah. Pengaruh Aristoteles yang sangat tampak dalam pemikiran Hannah Arendt adalah distingsi antara *oikos* (rumah tangga) dan *polis* (negara kota)(Pandor, 2013). Hannah Arendt berpendapat bahwa kehidupan dalam rumah tangga diatur berdasarkan kebutuhan hidup dan fokus pada pemeliharannya, sedangkan di negara kebebasanlah yang menjadi dasarnya(Hannah Arendt, 1961). Dalam pemahaman ini Hannah Arendt memberikan makna seperti ruang publik. Ruang publik dipahami sebagai ruang terbuka, disana orang bisa bicara dengan bebas, berbuat dan berkata-kata dalam konteks relasi antar manusia. Hal ini tidak dibatasi oleh budaya dan tradisi yang membuat pemahaman menjadi keliru.

Pemikiran antara *oikos* dan *polis* lalu membuat Hannah Arendt menentukan mana yang membedakan mana politik dan mana bukan politik. Dengan ini pemahaman Arendt terhadap politik seperti kebebasan. Kekuasaan itu membatasi aktivitas berelasi warga negaranya, dalam negara yang menganut antitesa politik tidak ada kebebasan untuk berpendapat, bereaksi terhadap pemerintah atau berpolitik. Semua

aspek kehidupan diatur oleh pemerintah. Masyarakat dibutuhkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pemimpin yang terjun dalam politik. Berdasarkan pengaruh Aristoteles di atas, Arendt mengkritik tradisi politik yang diwariskan oleh Platon. Ia merumuskan kritiknya demikian; pengalaman Plato dengan masyarakat Yunani, bahwa kekuasaan dilakukan sebagai penguasaan terhadap budak, yaitu hubungan antara budak dengan pemerintah mempunyai jarak (Hannah Arendt, 1958). Rumusan seperti ini Arendt kurang setuju karena kekuasaan dipandang sebagai kepatuhan terhadap orang tinggi. Dengan ini Arendt berpikir ada politik dibalik semua ini. Selain itu Arendt membandingkan bahwa ide-ide filosofis yang diterapkan Platon untuk mengatur kehidupan Kota yang tidak benar, karena di dalamnya banyak politik. Penulis menggambarkan bahwa ide digunakan sebagai tembok yang mengatur berjalannya politik, agar politik sebagai ruang publik. Agar ide yang menjadi pemantik untuk menuju kebebasan dalam berpolitik.

Pemikiran Hannah Arendt tentang Manusia dan Masyarakat

Manusia adalah orang yang mengendalikan politik, dengan itu manusia disebut unik. Dengan keunikannya tidak bisa ditelusuri dengan pertanyaan "apa" manusia. Adanya pertanyaan seperti ini hanya menuntut penjelasan tentang tipe, model, karakter, jenis, dan sebagainya. Manusia dimengerti bukan berdasarkan pada dirinya sendiri melainkan pada analisa statistic yang ditandai oleh data-data yang menunjukkan identitas manusia. Keunikan manusia hanya bisa ditelusuri dengan pertanyaan "siapa manusia". Dengan pertanyaan "siapa" pencarian tentang manusia langsung merujuk pada dirinya sendiri dan bukan yang lain. Keunikan manusia inilah yang menjadi pemantik untuk menemukan masalah politik yang terjadi sampai saat ini. Siapa manusia menurut Hannah Arendt telah dijelaskan sebagai besar dalam buku *The Human Condition*. Dengan terminology *vita active* Arendt menandai tiga hal fundamental dari

aktivitas manusia yaitu; kerja, karya dan tindakan. Dengan terminology ini sudah menjadi pertanyaan yang mengacu pada manusia yang menjelaskan bahwa manusia itu beraktivitas, manusia bergerak dan tidak tinggal diam ditempat.

Dari pemahaman Hannah Arendt tentang kerja, karya dan tindakan. Kurang lebih demikian penjelasan Hannah Arendt tentang kerja, karya dan tindakan(Hannah Arendt, 1958). Kerja adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan proses biologis tubuh manusia yang perkembangannya bergantung pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang dipenuhi dengan kegiatan kerja. Sedangkan karya berhubungan dengan eksistensi manusia yang tidak natural dan tidak dapat dipahami dengan siklus mekanis-alamiah. Manusia disini dapat dipahami seperti instrumen bagi yang lain, yang disebut keduniaan. Keduniaan adalah benda-benda yang sifatnya artifisial saja. Tindakan adalah satu-satunya aktivitas manusia yang terjadi secara langsung antara manusia yang lainnya. Oleh karena itu, Hannah Arendt dari ketiga itu dapat

disimpulkan bahwa manusia adalah unik. Artinya manusia itu tidak kekal mempunyai kelemahan dan dapat hancur. Akan tetapi manusia mempunyai potensi menjadi abadi karena ucapan dan tindakannya tetap ada walau tubuhnya dapat hancur.

Dengan definisi manusia yang begitu kompleks jelas sekali bahwa manusia tidak dapat beraktivitas tanpa sesamanya manusia. Dalam konteks ini gagasan Hannah Arendt mengenai masyarakat itu muncul dan mempunyai pemahaman bahwa masyarakat itu unik. Masyarakat merupakan status sosial yang amat menentukan bagaimana berjalanya politik. Status ini memungkinkannya untuk ikut serta dalam urusan-urusan publik(Hannah Arendt, 1995). Pada masyarakat mempunyai kelas-kelas, pentingnya kelas dalam masyarakat selalu dikaitkan dengan tingkat pendidikan. Dengan ini pemahaman masyarakat dapat dikaitkan dengan pemikiran Hannah Arendt yang memandang masyarakat sebagai komunitas besar manusia yang bergerak secara bebas dalam suatu negara. Masyarakat mempunyai

tujuan hidup bersama yang harus dicapai bersama. Dalam perjalanan hidup masyarakat tidak dapat dibatasi oleh tradisi atau determinasi dari ruang privat. Ruang gerak masyarakat adalah ruang publik. Namun muncul dilemma karena dalam hidup masyarakat modern yang dominan bukan tatanan politik melainkan tatanan sosial(Sudibyoy, 2012). Dalam tatanan sosial, batas antara ruang publik dan ruang privat tidak jelas dan sulit untuk dimengerti. Hal itu dapat terbukti dalam pengalaman hidup sehari-hari, dimana kadang-kadang persoalan di ruang publik dibawa ke dalam ruang privat, sedangkan persoalan di ruang privat kerap dibawa ke ruang publik. Hal inilah yang sulit untuk dipahami ketika terjun di dalam politik.

Pengertian Kebebasan

Politik dipahami pada masa Hannah Arendt adalah kaos. Pada waktu itu ia ada di bawah kekuasaan Rezim Nazi. Rezim ini memimpin negaranya dengan paham totalitarianisme, totalitarianism adalah paham yang menyatakan bahwa kekuasaan itu bersifat total. Pada

hakekatnya bisa menembus segala ruang (ruang privat dan ruang publik) dalam suatu negara, melakukan kebenaran secara total sehingga tidak ada ruang untuk wadah berpendapat(Hannah Arendt, 1995). Kebebasan setiap warga negara direduksi dalam kekuasaan total seorang pemimpin. Dengan pemahaman total ini setiap kebijakan tidak bisa dibantah, karena kekuasaan ada pada pemimpin. Menurut Hannah Arendt, pada waktu krisis politik seperti dalam konteks politiknya, kebebasan menjadi tujuan langsung dari tindakan politis (berpolitik)(Hannah Arendt, 1961). Hidup bersama dalam organisasi politik harus didasari dengan kebebasan karena tanpa itu kehidupan bersama tidak ada maknanya. Dengan kata lain, tanpa kebebasan seluruh hidup politik tidak ada artinya. Politik selalu berdampingan dengan kebebasan, karena di dalam politik orang berhak menyampaikan pendapat dan kebijakan yang menunjang politik. Berdasarkan pemahaman dan konteks yang terjadi, bahwa bagi Hannah Arendt kebebasan

itu perlu dibahas. Jika kebebasan tidak dipahami dengan baik, maka pemahaman tentang kebebasan tidak memadai. Kalau pemahaman tentang kebebasan tidak baik, bagaimana kebebasan bisa menjadi pondasi politik yang kokoh untuk politik.

Arendt pertama kali berpikir tentang apa itu kebebasan. Arendt setuju dengan Kant, mengakui bahwa semua manusia memiliki kehendak bebas. Setiap orang pada dasarnya bebas. Tetapi kebebasan sejati hanya ada dalam pikiran. Buktinya, orang baru tahu kebebasannya saat bersama orang lain. Berdasarkan fakta di atas, kebebasan harus ditunjukkan agar kebebasan dapat diberikan. Dalam gagasan *Vita Activa* Arendt terdapat aktivitas dasar manusia yang terjadi tanpa perantara: tindakan. Tindakan adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan. Arendt menekankan bahwa tindakan adalah hadiah yang dapat digunakan orang kapan pun mereka ingin menunjukkan kebebasannya. Jadi bebas berarti bertindak. Menurut Arendt, kebebasan adalah tindakan. Perilaku memiliki karakter bawaan. Artinya, tindakan

manusia selalu menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Tindakan tidak didorong oleh motif batin, ditentukan oleh pikiran, atau didorong oleh keinginan. Itu sepenuhnya berasal dari hubungan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hasil tindakan adalah hasil kerja sama. Bagi Arendt, tindakan manusia mewakili kebebasan, tetapi kebebasan ini belum sepenuhnya menjadi kebebasan manusia. Kebebasan baru menjadi milik manusia secara keseluruhan ketika dijamin oleh badan politik, yaitu negara (Robertus Wijanarko, 2017).

Pelaku (Subjek) Kebebasan Politik

Satu-satunya subjek kebebasan adalah manusia. Dalam kebebasan politik ini, kebebasan merupakan produk kesadaran manusia yang dilakukan secara sadar. Kalau pluralitas merupakan *condition sine qua non* politik dan pluralitas adalah syarat supaya tindakan dan ucapan terjadi, sementara pluralitas dan kebebasan adalah satu dan sama. Maka jelas tindakan itu mengimplikasikan kebebasan. Itu berarti selain pluralitas kebebasan merupakan *condition of*

possibility dari politik (Lehan, 2020). Tindakan yang mengimplikasikan kebebasan itu tidak dibaca sebagai tindakan yang menghasilkan atau mengakibatkan kebebasan tetapi tindakan yang mempersyaratkan kebebasan. Politik adalah tindakan maka politik mempersyaratkan kebebasan. Dengan ini politik tanpa disertai dengan kebebasan bukanlah politik. Manusia adalah satu-satunya makhluk rasional. Dalam banyak hal, rasionalitas telah membuat manusia menjadi lebih unggul dibandingkan dengan binatang dan tumbuhan. Hal ini adalah salah satu faktor membedakan manusia dengan yang lain selain sesamanya manusia. Begitu pula dengan kebebasan politik yang bisa dipahami dalam kategori kebebasan, sementara anti politik dalam kategori dominasi. Kategori kebebasan itu nyata dalam ruang publik, sementara dominasi adalah modus sosialisasi dan hubungan yang terjadi dalam ruang privat.

Kebebasan dalam politik sebagai status manusia. Hal ini bisa diakui apabila manusia itu menghubungkan diri dalam ruang

publik. Tetapi tidak semua pergaulan dan jenis kelompok itu didasari oleh kebebasan. Kebebasan itu terjadi ketika manusia hidup bersama tetapi tidak berbentuk badan politik. Dalam kelompok suku atau dalam rumah tangga pribadi, faktor-faktor yang mengantar tindakan dan perilaku mereka bukanlah kebebasan tetapi kebutuhan-kebutuhan hidup dan berpusat pada pemeliharannya. Dari pemahaman seperti ini relasi antar-manusia itu sangat penting, karena setiap manusia yang satu dengan yang lainnya ingin bebas dengan itu relasilah yang dapat menyatukan sesama manusia. Relasi antar manusia dibangun dengan baik sehingga terciptalah ruang publik yang baik. Ruang publik yang dimaksud Hannah Arendt adalah badan politik. Badan politik inilah yang akan menjadi jaminan bagi status manusia, yaitu kebebasan yang bertindak di dalam politik.

Vita Activa

Vita Activa adalah aktivitas fundamental manusia. Pengertian itu

dapat dilihat pada penggunaan terminology tersebut. Hannah Arendt menggunakan terminologi itu untuk mengemukakan tiga aktivitas fundamental manusia yaitu; kerja, karya dan tindakan. Ketiganya bersifat fundamental karena masing-masing cocok untuk satu kondisi dasar manusia yang hidup di atas dunia yang dianugerahkan kepadanya(Hannah Arendt, 1958). Arendt menjelaskan bahwa ketiga aktivitas fundamental manusia itu secara mendalam berhubungan dengan kondisi yang lebih umum dari eksistensi manusia yaitu; lahir dan mati, natalitas dan mortalitas(Hannah Arendt, 1958).

Aktivitas manusia seperti kerja, itu menjamin bukan hanya keberlangsungan hidup individu, melainkan juga hidup segala jenis makhluk. Kerja membuat individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karya dan hasil karya menandakan hidup manusia yang dapat mati dan fana. Meskipun keduanya memiliki daya guna dan daya tahan, tetap saja keduanya itu tidak abadi. Lalu ada tindakan, tindakan membangun dan

memelihara badan-badan politis, membuat kondisi dasar manusia diingat dan menjadi sejarah. Karena lewat sejarah inilah politik semakin tajam untuk dibahas.

Kerja, Karya dan Tindakan

Hannah Arendt mengatakan bahwa kerja adalah aktivitas manusia yang sesuai dengan proses biologis tubuh manusia, yang tumbuh secara spontan, yang sama dengan metabolisme dan kerusakannya terkait pada kebutuhan-kebutuhan penting yang diproduksi dan dimasukkan ke dalam proses hidup kerja. Kondisi kerja adalah hidupnya sendiri. Kesadaran manusia akan kerja sebagai hidup menjadi kabur akibat paksaan dengan cambuk sang tuan terhadap budak. Hal itu bukan membuat para budak bekerja bukan karena kesadaran melainkan karena paksaan dengan kekerasan(Pandor, 2013).

Arendt menyatakan bahwa karya adalah aktivitas yang berkorespondensi dengan ketidakalamian eksistensi manusia, yang mortalitasnya tidak digantikan oleh lingkungan kehidupan yang selalu terulang jenis nya(Pandor,

2013). Tingkatan ini harus diakui lebih tinggi dari tarif kerja. Karena pada karya ini manusia menyediakan sebuah benda yang dapat digunakan. Manusia menciptakan sesuatu yang dapat memisahkan dia dari alam sekitarnya. Kondisi kehidupan manusia terletak pada kehidupan keduniawiannya. Dapat dipahami dengan benda-benda hasil karya manusia mempunyai landasan hidup yang kokoh dan kuat. Benda-benda itu membantu manusia dalam proses dirinya. Identitas manusia memiliki penopang yang kuat karenanya. Hal ini membuat tindakan manusia memiliki koherensi. Sehingga manusia tidak menjadi bagian dari siklus alam dan merasa nyaman dengan lingkungannya. Dapat dipahami benda-benda hasil karyanya disebut produk.

Bagi Hannah Arendt tindakan adalah satu-satunya aktivitas yang terjadi secara langsung tanpa perantara benda atau bahan lain berhubungan dengan kondisi manusia pluralis yang hidup di atas dunia dan mendiami dunia secara langsung. Arendt juga mendefinisikan tindakan sebagai

aktivitas manusia yang paling penting dan ultim, sebab di dalamnya terdapat kebebasan dan pluralitas.(Pandor, 2013) Kondisi manusia tindakan adalah politik. Tindakan adalah aktivitas langsung yang terjadi dalam perjumpaan. Tanpa sosietas manusia tidak ada perjumpaan. Kalau saja perjumpaan tidak ada, maka aktivitas tindakan pun tidak ada. Karena itu dapat dipahami bahwa tindakan sepenuhnya bergantung pada kehadiran yang nyata dan konsisten dari orang lain.

Kebebasan (*freedom*) dan Pembebasan (*liberation*)

Penampakan pertama kebebasan dalam tradisi filsafat ada pada pengalaman perubahan yang berhubungan dengan agama-pertama-tama dari Paulus dan kemudian dari Agustinus(Hannah Arendt, 1961). Mereka adalah yang pertama membuat kebebasan itu tampak. Sedangkan sebelumnya, sejak zaman pra-Sokrates sampai pada Plato sebagai filsuf kuno terakhir, belum ada keasikan dengan kebebasan. Kebebasan belum menjadi tema pembahasan orang-orang yang

memahami kebebasan. Sejak periode patristik dalam filsafat khususnya pada zaman Agustinus, kebebasan menjadi tema pembahasan yang sangat menarik. Persoalan tentang kebebasan menjadi pertanyaan besar metafisika dalam sejarah seperti: ada, waktu, ketiadaan, jiwa, kekekalan dan lain sebagainya. Mulai saat itu kebebasan menjadi tema penyelidikan berfilsafat sepanjang waktu (Hannah Arendt, 1961). Oleh karena itu Hannah Arendt mengatakan bahwa tindakan untuk menjadi bebas itu seharusnya didasarkan pada apa yang dia sebut prinsip. Prinsip dimengerti jauh lebih umum untuk menentukan tujuan-tujuan partikular. Jika didistingui dari tujuannya, prinsip dari tindakan dapat diulang. Sedangkan jika itu didistingui dari motifnya, validitas dari prinsip adalah universal, artinya tidak terikat pada macam-macam pribadi atau kelompok. Dapat ditegaskan oleh Hannah Arendt prinsip itu adalah kehormatan atau kemuliaan, cinta akan keseimbangan, tetapi juga takut atau tidak percaya atau tersakiti. Dengan melihat ini bisa dikatakan bahwa kebebasan menjadi tampak di dunia kapanpun prinsip itu dapat

diaktualisasikan. Bahwa menjadi bebas dan bertindak adalah sama. Jadi kebebasan manusia adalah berkaitan dengan tindakannya.

Pengertian Politik

Politik adalah urusan manusia. Politik adalah soal bagaimana manusia harus hidup di antara dan bersama dengan yang lain dalam suatu tatanan hidup. Berbicara mengenai politik berarti berbicara mengenai aspek pluralitas manusia. Politik menjadi tema sentral dalam filsafat sejak zaman para filsuf kuno seperti Platon dan Aristoteles. Kesadaran akan betapa penting di dalam politik karena tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa manusia ada bersama dengan yang lain. Setiap manusia adalah subyek bagi sesamanya. Keunikan setiap manusia tidak bisa diseragamkan. Kesamaan pada setiap keunikan manusia dibatasi otomatis manusia berhenti bereksistensi, hal ini diartikan bahwa manusia itu mati. Politik ada untuk menjamin eksistensi setiap manusia, manusia membutuhkan tempat untuk mengaktualisasikan dirinya dan mendapatkan pengakuan. Daya tarik

politik tak pernah habis oleh waktu, sebab semua orang sadar atau tidak sadar akan membahas politik. Hal ini bisa terjadi karena manusia selalu berhubungan dengan yang lain.

Hannah Arendt adalah salah satu sosok wanita pemberani dan yang di masanya telah memusatkan pikirannya pada politik. Hannah Arendt bergulat dengan politik tidak hanya dengan pikirannya, melainkan dengan seluruh hidupnya. Refleksi Hannah Arendt tentang politik begitu unik, pendekatan yang digunakan untuk mengerti politik dikatakan sebagai pendekatan metodologis tunggal(d'Entéves, 2003).

Relevansi Kebebasan Politik Bagi Masyarakat Indonesia Dewasa Ini Menurut Hannah Arendt

Arendt mengemukakan tentang politik melalui tiga struktur dasar kehidupan aktif manusia (*vita activa*). Ketiga struktur tersebut antara lain kerja, karya dan tindakan. Secara konkret, ketiga aktivitas tersebut sungguh-sungguh dialami dan bukan merupakan hasil bangunan konseptual atau semacam abstraksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Arendt

juga mengemukakan bahwa di antara ketiga aktivitas manusia itu, tindakan merupakan hal yang bersifat politis. Arendt juga menambahkan bahwa tindakan tersebut diidentifikasi dengan politik. Hal ini berarti bahwa politik merupakan tindakan, dan tidak tersebut adalah politik. Pemikiran Arendt ini disebut juga sebagai tindakan politik(Koten, 2017). Relevansi yang dibuktikan oleh Pemerintahan Jokowi berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto dalam Orde Baru yang cenderung otoriter, Pemerintah Jokowi melaksanakan tindakan politik yang jelas dengan membangun komitmen antikorupsi melalui Nawa Cita dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan(Fariz, 2019).

Menurut Arendt, kerja (*labor*) merupakan cara manusia dalam melaksanakan aktivitas hariannya supaya tetap hidup seperti makan, minum, dan segala macam aktivitas yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hubungannya bagi eksistensi manusia, kerja merupakan aktivitas yang berkaitan erat dengan proses

biologis. Untuk mempertahankan rencana dan kebutuhan manusia. Hal hidup, maka manusia membutuhkan tersebut membuat karya menjadi kerja. Berdasarkan distingsi Aristoteles aktivitas yang khas dari manusia atas *oikos* (dunia privat rumah tangga) (yakni non-hewani). Kedua, oleh yang dimulai dari polis (dunia publik karena karya diatur oleh tujuan dan komunitas politik), Arendt maksud manusia maka dari itu karya berpendapat bahwa masalah kerja, berada di bawah sebuah kekuasaan ekonomi, dan sejenisnya digolongkan dan kontrol manusia. Karya mencoba ke dalam yang pertama (*oikos*) memperagakan suatu mutu tertentu daripada yang kedua (polis). dari sebuah kebebasan (*freedom*), tidak Munculnya kerja (*labor*) dari dunia seperti kerja (*labor*) yang lebih tunduk pada alam dan keniscayaan. Ketiga, memberikan efek yang kerja menyangkut pada pemuasan menghancurkan politik dengan kebutuhan hidup individual. Maka mensubordinasi dunia publik dari dari itu, pada hakekatnya tetap kebebasan manusia ke bawah masalah merupakan urusan privat. Karya yang hanya merupakan kebutuhan secara inheren bersifat publik. Karya hewani. Karya (*work*) merupakan diciptakan untuk satu tujuan dan sebuah aktivitas yang produktif, hal dunia bersama yang eksistensinya ada tersebut berarti bahwa satu proses di tengah manusia serta menyatukan diikuti untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun bukan merupakan material. Menurut Arendt, Karya bentuk aktivitas manusia yang menciptakan dunia yang ada di berhubungan dengan politik, karya sekitar. Karya (*work*) dapat selalu merupakan suatu prakondisi bagi dibedakan dari kerja (*labor*). Pertama, adanya sebuah komunitas kerja (*labor*) terikat oleh tuntutan politik (Molan, 2009).

Dalam kaitannya dengan animalitas, biologis dan alamiah perkembangan politik Indonesia, kerja (*animal laborans*). Karya tersebut merupakan unsur yang menjadi melintasi dunia alamiah dengan cara pendorong tumbuhnya kedaulatan membentuk dan kemudian politik. Menurut Tempo, dalam mentransformasinya sesuai dengan politik.

Gerakan Nasional Revolusi Mental Tindakan (*action*) menurut terdapat tiga nilai utama untuk Arendt merupakan aktivitas yang menggerakkan revolusi mental yaitu produktif, namun pengertian tersebut integritas, etos kerja, dan gotong tidak menyangkut benda atau dalam royong oleh semua lapisan bangsa. pengertian material. Tindakan Etos kerja merupakan sebuah sikap merupakan segala hal yang dilakukan yang bermuara pada hasil yang manusia ketika berkomunikasi antara terbaik, berdaya saing yang tinggi, satu dengan yang lain. Terdapat suatu optimisme, dan senantiasa mencari fakta bahwa "*men, not man, live on the earth*"; yang berarti bahwa manusia dalam menopang Indonesia yang hidup dalam pluralitas. Manusia (*men*) Mandiri(Tempo.co, 2016). Presiden harus melaksanakan organisasi diri Jokowi sendiri menggaungkan jargon mereka sendiri dalam suatu cara, dan "Kerja, kerja, kerja" untuk tindakan yang merupakan cara untuk menunjukkan semangat berkarya melakukannya, khususnya mengenai dalam mengembangkan revolusi hal yang menyangkut politik(Molan, mental yang sebenarnya sudah 2009). diperkenalkan oleh Presiden Soekarno Untuk dapat mewujudkan untuk mengubah mentalitas tindakan produktif, negara Indonesia masyarakat Indonesia di zaman itu. memiliki implementasi dan strategi di Presiden Jokowi menekankan revolusi bidang politik. Hal tersebut dapat mental dalam kaitannya dengan etos diwujudkannyatakan dalam bentuk: (1) kerja yaitu mengubah cara pandang, melakukan penguatan keberadaan dan pikir dan sikap, perilaku dan cara kelangsungan Negara Kesatuan kerja, membangkitkan kesadaran dan Republik Indonesia yang didasarkan pada kebhinekatunggalikaan. Agar membangun sikap optimistik, dan dapat menyelesaikan berbagai mewujudkan Indonesia yang masalah yang mendesak dalam berdaulat, berdikari, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berkepribadian(Amalia, 2019). dan bernegara, diperlukan sebuah

upaya rekonsiliasi nasional bidang politik. (5) melakukan berdasarkan undang-undang. (2) peningkatan kemandirian partai melakukan penyempurnaan Undang- politik terutama dalam Undang Dasar 1945 yang seirama memperjuangkan aneka aspirasi dan dengan perkembangan kebutuhan kepentingan rakyat serta melakukan bangsa, dinamika dan tuntutan pengembangan fungsi kontrol secara reformasi. Hal tersebut dapat efektif terhadap kinerja lembaga- dilakukan untuk tetap memelihara lembaga negara dan mengupayakan kesatuan dan persatuan bangsa, serta peningkatan efektivitas, fungsi dan seirama dengan jiwa dan semangat partisipasi organisasi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kemasyarakatan, kelompok profesi 1945. (3) Meningkatkan peran Majelis dan lembaga swadaya masyarakat Permasyarakatan Rakyat, dan dalam kehidupan bernegara. (6) lembaga-lembaga tinggi negara melaksanakan peningkatan lainnya dengan melaksanakan pendidikan politik dengan cara yang penegasan terhadap fungsi, wewenang intensif dan komprehensif kepada dan tanggung jawab yang terarah masyarakat agar dapat pada prinsip pemisahan kekuasaan mengembangkan budaya politik dan tata hubungan yang jelas antara demokratis, menghormati lembaga eksekutif, legislatif dan keanekaberagaman aspirasi, serta yudikatif. (4) sistem politik nasional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasar asa Pancasila dan UUD 1945.(7) yang dikembangkan berdasarkan pada Melaksanakan upaya memasyarakatan kedudukan rakyat yang demokratis dan terbuka, serta mengembangkan serta penerapan prinsip persamaan cara hidup kepartaian yang senantiasa dan anti diskriminatif dalam menghormati keberagaman aspirasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa politik, serta pengembangan suatu sistem dan penyelenggaraan pemilu dan bernegara(Pasaribu, 2013). yang demokratis dengan cara Mengenai kebebasan, Arendt menyempurnakan berbagai peraturan mengambil polis Athena sebagai perundang-undangan terutama di sebuah model ruang pidato yang

komunikatif dan terbuka. Tindakan itu menurut Arendt sama maknanya dengan politik. Politik merupakan suatu aktivitas yang berkelanjutan dari warga negara yang melakukan aktivitas berkumpul bersama sehingga memungkinkan kapasitas untuk membentuk suatu perwakilan (*agency*) dalam menjalankan hidup bersama. Politik dan pelaksanaan kebebasan sebagai aksi merupakan hal yang satu dan sama. Kebebasan sesungguhnya merupakan alasan bagi orang untuk hidup bersama dalam suatu organisasi politik. Tanpa adanya kebebasan, kehidupan politik semacam itu akan menjadi tidak memiliki makna. Dasar yang paling penting dari politik adalah kebebasan dan bidang pengalamannya adalah tindakan (Molan, 2009). Dilihat dari konteks politik Indonesia, penerapan kebebasan telah dilaksanakan pemerintahan Jokowi dengan melakukan beberapa hal yakni kebebasan politik luar negeri, Gambaran pencapaian posisi demokrasi Indonesia tahun 2020 dalam kaitannya dengan kebebasan adalah sebagai berikut: (1) kebebasan berkumpul dan berserikat 86,79%, (2) kebebasan berpendapat 56,06%, (3) kebebasan berkeyakinan 86,57%, (4) kebebasan dari diskriminasi 90,88%, (5) Hak memilih dan dipilih 79,41%, (6) partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan 54%, (7) Pemilu yang bebas dan adil 85,75%, (8) Peran DPRD 64,94%, (9) Peran Partai Politik 75,66%, (10) Peran Birokrasi pemerintah daerah 59,72%, (11) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 59,72%, (12) Peran Peradilan yang Independen (90,17%) (Heryanto, 2015).

Dalam politik Negara Indonesia, kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum harus diterapkan secara bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tepatnya dalam pasal 28 UUD 1945 serta amandemen yang sudah empat kali dilakukan dan prinsip hukum internasional yang tercantum dalam pasal 29 dalam deklarasi universal HAM dekret 1949 yang berlaku secara internasional termasuk Indonesia (Nuna & Moonti, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 mengenai kebebasan dalam

menyampaikan pendapat di muka umum terdapat lima asas yang menjadi landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu : (1) asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, (2) asas musyawarah dan mufakat, (3) asas kepastian hak dan keadilan, (4) Asas proporsionalitas, serta (5) Asas mufakat.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk: (1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, (2) Menghormati aturan-aturan moral yg berlaku secara umum, (3) Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku, (4) Menjaga keamanan dan ketertiban umum, (5) Menjaga keutuhan persatuan kesatuan bangsa.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan warga negara dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu : (1) Pendapat yang dikemukakan harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal sehingga tidak sembarangan berpendapat, (2) Pendapat hendaknya

mewakili kepentingan orang banyak sehingga bermanfaat bagi kehidupan bersama, (3) Pendapat dikemukakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hak, (4) Orang yang berpendapat harus memiliki pikiran yang terbuka dan siap menerima kritik dan saran dari orang lain, (5) Penyampaian pendapat hendaknya berdasarkan pada suatu keinginan dan kebaikan bersama untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi(Jailani, 2015).

Berdasarkan pendapat di atas, warga negara bebas untuk mengungkapkan pendapat dalam ruang politik dengan syarat yakni tidak bertentangan dengan ideologi Negara Republik Indonesia yakni pancasila, UUD 1945, tujuan Negara Republik Indonesia serta menghargai hak dan kewajiban sesama warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam konstitusi.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Politik menurut Hannah Arendt sangat relevan dengan dunia politik masyarakat Indonesia dewasa ini.

Menurut Arendt, Kerja tidak berkaitan dengan aktivitas sehari-hari (labor) tetapi lebih dikaitkan pada karya (work) yang diciptakan untuk satu tujuan dan dunia bersama yang eksistensinya ada di tengah manusia serta menyatukan mereka. Meskipun bukan merupakan bentuk aktivitas manusia yang berhubungan dengan politik, karya merupakan suatu prakondisi bagi adanya sebuah komunitas politik. Sementara itu, kaitannya dengan politik Indonesia, Etos kerja merupakan sebuah sikap yang bermuara pada hasil yang terbaik, berdaya saing yang tinggi, optimisme, dan senantiasa mencari cara-cara yang produktif dan inovatif dalam menopang Indonesia yang mandiri.

Mengenai kebebasan, Arendt mengambil polis Athena sebagai sebuah model ruang pidato yang komunikatif dan terbuka. Tindakan itu menurut Arendt sama maknanya dengan politik. Dalam Politik Indonesia, kebebasan politik di ruang publik dapat diwujudkan dengan cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku tepatnya dalam pasal 28 UUD 1945 serta amandemen yang sudah empat kali dilakukan dan prinsip hukum internasional yang tercantum dalam pasal 29 dalam deklarasi universal HAM dekret 1949 yang berlaku secara internasional termasuk Indonesia. Warga negara bebas untuk mengungkapkan pendapat dalam ruang politik dengan syarat yakni tidak bertentangan dengan ideologi Negara Republik Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945, tujuan Negara Republik Indonesia serta menghargai hak dan kewajiban sesama warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam konstitusi. Dengan kata lain, kesadaran politik bangsa Indonesia sudah cukup baik dan penerapannya telah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2019). Revolusi Mental Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22(2), iv-vi. <https://doi.org/10.31845/jwk.v22i2.196>
- Arendt, H. (1994). *Essays in understanding, 1930-1954:*

- Formation, exile, and totalitarianism*. Harcourt Brace.
- Arendt, Hannah. (1958). *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt, Hannah. (1961). *Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought*. New York: The Viking Press.
- Arendt, Hannah. (1995). *Asal-Usul Totalitarianisme* (J. M. Subijanta, Penerj.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- d'Entéves, M. P. (2003). Filsafat Politik Hannah Arendt, (Penerjemah: M. Shafwan).
- Eddyono, A. S. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam. *KOMUNIKA*, 8(1), 53–60. <https://doi.org/10.22236/komunika.v8i1.5672>
- Farchan, Y. (2022). DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152–161. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>
- Fariz, D. (2019). Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 19–33. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.468>
- Hardiman, B. (2007). Watak Paradoksal Hak Asasi. *BASIS: Edisi Khusus Hannah Arendt*, Vol. 03-04.
- Heryanto, G. G. (2015). Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi: Mengkaji Peran Media dan Partisipasi Publik. *Jurnal Communicate*, 1(1), 31–46.
- Jailani, J. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*. Diambil dari <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2197>
- Jemali, M. (2015). Eskalasi Tindakan Politik Dalam Perspektif Filosofis Hannah Arendt. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*. Diambil dari <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jpkm/article/view/18>
- Koten, Y. K. (2017). *Hannah Arendt dan Politik yang Bermartabat*. repository.stfkledalero.ac.id. Diambil dari <http://repository.stfkledalero.ac.id/299/1/Prolog%20Buku%20Tindakan%20Politik.pdf>
- Lehan, A. A. D. (2020). Pendidikan Multikultural Bagi Generasi Emas dalam Kerangka Diagnosis Arendt. *Jurnal Sejarah*. Diambil dari <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/js/article/view/470>
- Molan, B. (2009). Hannah Arendt: Kekerasan Bukan Tindakan Politik, Namun Bukan Tanpa Resiko. *Respons: Jurnal Etika Sosial*. Diambil dari <http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/ppe/article/view/969>
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Pandor, P. (2013). Menyimak Tabir Politik Otentik Arendtian:

- Sebuah Pembacaan dari
Perspektif Etika Politik. *Arete'*,
Vol. 2 No. 1.
- Pasaribu, R. B. F. (2013, Maret 3).
Kewarganegaraan. Diambil 22
September 2022, dari Mr. Rows
Namoura Coffee website:
<https://rowlandpasaribu.wordpress.com/perkuliahankewarganegaraan/>
- Rd, A. Z. (2021). MEWUJUDKAN
DEMOKRASI INDONESIA
SESUAI KEPERIBADIAN
BANGSA DARI PRESPEKTIF
STRATEGI PERANG
SEMESTA. *Strategi Perang
Semesta*, 7(2), 99-122.
<https://doi.org/10.56555/sps.v7i2.683>
- Robertus Wijanarko, P. D. 1 D. V.
(2017). *Kebebasan Politik Menurut
Hannah Arendt dan Relevansinya
Bagi Masyarakat Indonesia
Dewasa Ini (Sebuah Tinjauan
Filosofis)*. STFT Widya Sasana.
(Malang). Diambil dari
http://librarystftws.org/perpus/index.php?p=show_detail&id=5627&keywords=
- Sudibyo, A. (2012). *Politik otentik:
Manusia dan kebebasan dalam
pemikiran Hannah Arendt*. Marjin
Kiri.
- Tempo.co. (2016, Desember 7). 3 Nilai
Utama Penyokong Indonesia
Mandiri. Diambil 22 September
2022, dari Tempo website:
<https://nasional.tempo.co/read/825913/3-nilai-utama-penyokong-indonesia-mandiri>